



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 343/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 31/KEP/HK/2025 TENTANG TIM  
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KEP/HK/2025 dan Perubahannya telah ditetapkan Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-UNDang ...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 139/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara timur Nomor : 31/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 September 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 343/KEP/HK/2025

TANGGAL : 11 September 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA ITIMUR NOMOR : 31/KEP/HK/2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penyusunan dan penelaahan APBD.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Memberikan arahan dalam melakukan penyusunan dan penelaahan APBD.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasi dan memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi dan memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi dan memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan daerah; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan keuangan daerah; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IV	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD;</li> <li>c. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD; dan</li> <li>d. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD</li> </ul>
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11	Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
12	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
13	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
14	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja organisasi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
15	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
16	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
17	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
18	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
19	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
20	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
21	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan APBD dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
22	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
23	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24	Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
25	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>
26	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>



27	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul>
28	Yovni J. Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29	Clara A. W. S. Meko, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Prov NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30	Polykarpus D. Mauko, S.Kom/ Penata Kelola Sistem Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
31	Jorghie Heraldi Dami, S.IP, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.



32	Yuliastry K. Mawuntu, Sh, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
33	Patricia Maria Arthania, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas : a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.
34	Heriyanto Jemi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas : a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.
35	Satrya Dindus Liwe, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		



36	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan.</li> </ul>
37	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>



38	Joab Beda, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul>
39	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>e. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>f. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>



40	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ol>
41	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ol>



42	Anselmusi Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>
43	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul>

44	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
45	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul>



46	Oktoavianus Saka, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
47	Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>
48	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

49	Febriana Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;
50	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.
51	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.



52	Richardo D Putra Djogo, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
53.	Ronald M.A. Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54.	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ttd  
 KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
 NIP. 196609181986021001